



HIR.04.01/8687

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 010 /M.PPN/10/2001**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI  
*EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT (EIRTP)* DENGAN  
*THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai efisiensi dalam investasi pembangunan serta mewujudkan upaya pemerintah dalam rangka desentralisasi diperlukan keterpaduan perencanaan jaringan jalan nasional, propinsi, dan kabupaten;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dalam huruf a diperlukan dukungan dana luar negeri dan dilaksanakan secara lintas sektor antar lembaga/instansi terkait yaitu Bappenas, Departemen Pengembangan dan Prasarana Wilayah, Departemen Keuangan, Departemen Perhubungan, dan Departemen Dalam Negeri;
- c. bahwa untuk menjamin hasil guna dan daya guna pinjaman, dalam negosiasi pinjaman delegasi Republik Indonesia dengan *The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* diperlukan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi-instansi terkait;
- d. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan, sesuai tugas dan fungsinya sebagai delegasi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 228/M 2001 Tentang Kabinet Gotong Royong;

2. Keputusan...

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995, tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP.009/Ka/01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM NEGOSIASI *EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT (EIRTP)* DENGAN *THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)*.

PERTAMA : Menunjuk delegasi Republik Indonesia yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Perunding untuk negosiasi *Eastern Indonesia Region Transport Project (EIRTP)* dengan *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)*, pada tanggal 31 Oktober 2001 di Kantor Perwakilan *International Bank for Reconstruction and Development* Jakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam pelaksanaan negosiasi Tim Perunding akan dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Hasil negosiasi proyek "*Eastern Indonesia Region Transport Project*" tersebut dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;

KEEMPAT : Segala biaya pelaksanaan perundingan ini dibebankan kepada anggaran dari APBN masing-masing instansi;

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya negosiasi ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Oktober 2001

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
4. Menteri Perhubungan;
5. Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 010/M.PPN/10/2001

TANGGAL : 23 OKTOBER 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM  
*NEGOSIASI EASTERN INDONESIA REGION TRANSPORT PROJECT (EIRTP) DENGAN THE  
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (IBRD)*

SUSUNAN KE ANGGOTAAN TIM PENGARAH

1. Bambang Bintoro Soedjito  
Deputi Bidang Produksi, Perdagangan, dan Prasarana  
Bappenas
2. Hendrianto  
Direktur Jenderal Prasarana Wilayah  
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
3. Susmono  
Direktur Jenderal Perhubungan Darat  
Departemen Perhubungan
4. Deddy M. Masykur Riyadi  
Deputi Bidang Regional dan Sumber Daya Alam  
Bappenas
5. Moh. Abduh  
Deputi Bidang Pembiayaan dan Kerjasama Luar Negeri  
Bappenas
6. Ansyari Ritonga  
Direktur Jenderal Anggaran  
Departemen Keuangan

SUSUNAN...

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERUNDING

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Imron Bulkin<br>Direktur Transportasi, Pos, Telekomunikasi dan Informatika<br>BAPPENAS                       | sebagai Ketua   |
| 2. Ikhwanuddin Mawardi<br>Direktur Kewilayahan<br>BAPPENAS  | sebagai Anggota |
| 3. Freddy Herman Tulung<br>Direktur Kerjasama Luar Negeri Multilateral<br>BAPPENAS                              | sebagai Anggota |
| 4. Erlan Prasetyo<br>Kadit Lalu Lintas Angkutan Jalan, Ditjen. Perhubungan Darat<br>Departemen Perhubungan      | sebagai Anggota |
| 5. Edi Karsanto<br>Direktur Dana Luar Negeri<br>Dept. Keuangan  | sebagai Anggota |
| 6. Hisnu Pawenang<br>Direktur Bina Teknik<br>Dept. Kimpraswil   | sebagai Anggota |
| 7. Frankie Tayu<br>Direktur Prasarana Wilayah Timur<br>Dept. Kimpraswil   | sebagai Anggota |
| 8. Harry Pondaag<br>Direktur Prasarana Wilayah Tengah<br>Dept. Kimpraswil                                       | sebagai Anggota |
| 9. Rachmad Tatang Bachrudin<br>Sekretaris Menteri Muda Urusan Percepatan Pembangunan<br>Kawasan Timur Indonesia | sebagai Anggota |

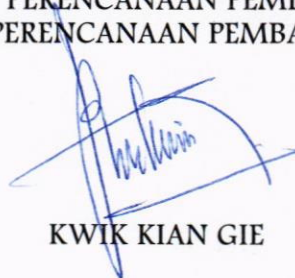
SUSUNAN...



## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Danis H. Sumadilaga<br>Direktorat Pembinaan Teknik<br>Dept. Kimpraswil                          | sebagai Ketua                   |
| 2. M. Hatta Latief<br>Direktorat Pembinaan Teknik<br>Dept. Kimpraswil                              | Sekretaris merangkap<br>Anggota |
| 3. Sigit Widhyarto<br>Direktorat Pembinaan Teknik<br>Dept. Kimpraswil                              | sebagai Anggota                 |
| 4. Nyoman Serutama<br>Direktorat Dana Luar Negeri<br>Dept. Keuangan                                | sebagai Anggota                 |
| 5. Otto Hadi Hernowo<br>Direktorat Kerjasama Luar Negeri Multilateral<br>BAPPENAS                  | sebagai Anggota                 |
| 6. Bambang Prihartono<br>Direktorat Transportasi, Pos, Telekomunikasi, dan Informatika<br>BAPPENAS | sebagai Anggota                 |
| 7. Berland Suhermawan<br>Direktorat Dana Luar Negeri<br>Dept. Keuangan                             | sebagai Anggota                 |
| 8. Haris Fabillah<br>Direktorat Jenderal Perhubungan Darat<br>Dept. Perhubungan                    | sebagai Anggota                 |
| 9. Jani Agustin<br>Direktorat Sistem Jaringan Prasarana<br>Dept. Kimpraswil                        | sebagai Anggota                 |

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE